

PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

M. Haikalus Shomadani¹, Masyhuri², Pramujianto³

¹Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ²Universtas Islam Malang,
³STAI Al-Yasini Pasuruan

mhaikaldani@gmail.com¹, mashuri.machfudz@unisma.ac.id²,
antotaslim99@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program keluarga harapan dalam mensejahterakan masyarakat dalam tinjauan ekonomi islam, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah program bantuan PKH memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat desa karangjati, dengan bantuan PKH masyarakat bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam pendidikan dan kesehatan, dalam tinjauan ekonomi islam bantuan PKH memberikan jaminan sosial melalui komplementaritas yang diberikan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh kementerian sosial RI, bahwasanya jaminan sosial yang diberikan merupakan jaminan kesehatan dan jamiian pendidikan, sehingga penerima manfaat PKH secara langsung mendapatkan jaminan sosial tersebut.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam

Abstract

This research aims to find out the program keluarga harapan for the welfare of society in an Islamic economic review, using qualitative research methods and a descriptive approach. The results of this study are that the PKH assistance program has an impact on the welfare of the Karangjati village community, with PKH assistance the community can be assisted in meeting their needs and requirements in education and health, in terms of Islamic economics PKH assistance provides social security through complementarity provided in accordance with the rules that have been made by the Indonesian Ministry of Social Affairs, that the social security provided is health insurance and education insurance, so that PKH beneficiaries directly get this social security.

Keywords: *Conditional cash transfers, Community Welfare, Islamic Economic*

A. PENDAHULUAN

Peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah dengan tujuan memperbaiki kehidupan penduduknya dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbelakangan ekonomi suatu negara adalah rendahnya efektivitas atau efisiensi tenaga kerja dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Efisiensi kerja yang rendah pada pekerja berpenghasilan rendah seringkali terkait dengan masalah kemiskinan, yang ditandai oleh kondisi gizi buruk, kesehatan yang tidak memadai, tingkat melek huruf yang rendah, dan keterbatasan mobilitas antara pekerjaan dan pendidikan (Listiana, 2022).

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan sosial dengan mendorong ekspansi ekonomi. dengan mengembangkan kebijakan, seperti program bantuan sosial. Transfer langsung uang (in-cash transfers) dan barang dan jasa (in-kind transfers) merupakan pilihan untuk memberikan bantuan sosial. Bantuan juga bisa tetap, terutama untuk masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak terlantar (Soemitro, 2002).

Upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya masyarakat miskin diwujudkan dengan harapan masyarakat miskin dapat hidup dengan layak dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta keluarganya, pewujudan fungsi sosial dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan meningkatnya fungsi sosial dengan baik maka menaikkan juga kesejahteraan hidup dirinya maupun keluarganya. Arti kemiskinan tidak hanya sebatas dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, melainkan juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang ataupun sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar ialah secara umum antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan secara layak bagi kemanusiaan, termasuk keterbelakangan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial, telah menciptakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai suatu program bantuan sosial. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH adalah program pemberian bantuan sosial dengan syarat kepada keluarga atau individu yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam sistem informasi terpadu untuk penargetan fakir miskin yang dikelola oleh Pusat Informasi dan Data Kesejahteraan Sosial, dan secara resmi diakui sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program bantuan tunai langsung bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dapat dijelaskan sebagai program bantuan tunai bersyarat, di mana penerima manfaat menerima bantuan secara tunai selama mereka memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Pada program ini mempunyai 3

sasaran buat keluarga miskin antara lain: pertama, komponen kesehatan (bunda berbadan dua/nifas serta anak umur dini dibawah 6 tahun). Kedua, komponen pembelajaran (SD, SMP, SMA). ketiga, komponen kesejahteraan sosial (disabilitas berat serta lanjut umur muali dari 70 tahun keatas) (Kemensos RI, 2021).

Program bantuan PKH memiliki tujuan utama untuk membantu keluarga miskin dengan harapan dapat meningkatkan standar hidup mereka dan mengurangi beban pengeluaran. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan dan pendidikan kepada penerima manfaat. Secara keseluruhan, PKH memiliki visi jangka panjang untuk memutus siklus kemiskinan dan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Melalui partisipasi dalam program PKH, masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk aktif terlibat, yang diharapkan akan memiliki dampak positif pada kehidupan mereka, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Tujuan akhir PKH adalah menciptakan kondisi sejahtera bagi masyarakat yang sebelumnya terjebak dalam kemiskinan yang ekstrem (rumah tangga sangat miskin/RTSM). (Wisnu Indrajid VO Soimin, 2014)

Desa Karangjati merupakan salah satu desa yang terletak dikecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan memiliki masalah ekonomi masyarakat, penyebab dari masalah tersebut ialah kurangnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada penghasilan masyarakat yang tidak memenuhi untuk kebutuhan dasarnya, masyarakat Desa Karangjati mayoritas penduduknya berpenghasilan dari buruh tani dan petani yang mana ketika musim panas daerah tersebut susah air dan mengakibatkan musim tanam hanya bisa dilakukan ketika musim hujan. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan pendapatan yang diperoleh.

Meskipun masih ada banyak penduduk di Desa Karangjati yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan PKH, kehidupan mereka belum mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Efektivitas bantuan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Desa Karangjati belum dapat dipastikan secara pasti.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan utama. Pertama, apa pengaruh bantuan Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Karangjati? Kedua, bagaimana program tersebut dapat dianalisis dari perspektif ekonomi Islam?

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana Program Keluarga Harapan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Karangjati dan bagaimana program tersebut dapat dievaluasi dari sudut pandang ekonomi Islam.

B. LANDASAN TEORI

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan tunai langsung yang ditujukan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Secara prinsip, PKH dapat dianggap sebagai bentuk asuransi bagi warga negara, namun lebih difokuskan dan terarah. Program ini dirancang untuk membantu penduduk miskin dalam kelompok terbawah melalui bantuan yang diberikan dengan syarat tertentu. Tujuan dari bantuan ini adalah memberikan akses yang lebih baik dalam hal pendidikan, kesehatan, pangan, dan gizi kepada penerima manfaat, serta mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memanfaatkan layanan-layanan tersebut, diharapkan bahwa ketidakberdayaan dan keterbelakangan sosial yang biasanya dialami oleh warga miskin dapat diatasi (Ahmad Sukarno, 2009).

Pada tingkat internasional, program bantuan semacam ini juga dikenal dengan istilah "Conditional cash transfers" (CCT) atau "Bantuan Tunai Bersyarat". Program ini memberlakukan persyaratan kepada penerima manfaat, seperti kehadiran anak-anak di lembaga pendidikan atau kehadiran ibu hamil dan balita di fasilitas kesehatan. Melalui bantuan PKH, tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat kemiskinan, memutus rantai kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan mengubah perilaku yang kurang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang paling miskin. Tujuan ini secara langsung terkait dengan upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) (Andika, 2021).

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera". Sejahtera ini dari bahasa Sanskerta yaitu "Catera" yang memiliki arti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan mempunyai makna orang yang sejahtera yakni orang yang dalam hidupnya leluasa dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan ataupun kekhawatiran sehingga hidupnya nyaman tenteram, baik lahir ataupun batin.

Menurut Kartiawati (2017) Kesejahteraan masyarakat merupakan sesuatu keadaan yang memperlihatkan tentang kondisi kehidupan warga yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut (Ulya Qorina, 2007).

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai dengan cermat melalui penggunaan teknik dan metode yang sesuai. Tujuan tersebut adalah memungkinkan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mengatasi tantangan yang muncul akibat perubahan pola masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui tindakan kerja sama untuk

meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial (Jurnal Dialog Kebijakan Publik, 2012). Tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial yakni diantaranya:

- a. Peningkatan tingkat kesejahteraan, mutu hidup, dan keberlanjutan kehidupan.
- b. Restorasi fungsi sosial untuk mencapai kemandirian.
- c. Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Peningkatan kemampuan, kesadaran, dan tanggung jawab sosial sektor bisnis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan model penelitian yang disusun untuk memberikan deskripsi sistematis informasi ilmiah dari topik atau subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam melakukan penelitian terhadap gejala alam karena orientasinya naturalis dan bersifat fundamental atau alami dan tidak dapat dilakukan di laboratorium tetapi harus turun ke lapangan (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah Desa Karangjati dan pendamping PKH desa Karangjati. Peneliti kemudian menyajikan bentuk data teks naratif untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Langkah terakhir dari penelitian adalah menuliskan temuan penelitian termasuk wawancara, menyajikan data secara akurat hingga tercapai kesimpulan akhir penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Keluarga Harapan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan bersyarat untuk masyarakat miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan ataupun kesejahteraan sosial (Direktorat Jaminan Sosial, 2012), bantuan PKH berjalan sejak tahun 2014 di Desa Karangjati, pada tahun tersebut jumlah penerima manfaat tidak banyak, seiring berjalannya program, pada tahun 2022 jumlah penerima manfaat PKH sebanyak 587 keluarga, penerima manfaat dari Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga merata pada setiap dusun di Desa Karangjati, untuk pendataan atau pengajuan agar menjadi anggota penerima manfaat PKH yakni melalui kantor desa, untuk penentuan data penerima merupakan kewenangan kementerian sosial sesuai kuota yang telah ditetapkan. Pemerintah memberikan bantuan Program Keluarga Harapan jumlahnya

berbeda-beda tergantung komponen yang dimiliki penerima manfaat, tahun 2022 pemerintah memberikan bantuan PKH satu tahunnya untuk komponen kesehatan yakni ibu hamil dan balita Rp. 3.000.000, untuk komponen pendidikan, anak sekolah SD Rp. 900.000 SMP Rp. 1.500.000 SMA Rp. 2.000.000, komponen kesejahteraan sosial yakni lansia dan disabilitas satu tahun jumlah bantuan yang diterima Rp. 2.400.000. jumlah tersebut diberikan secara termin, dalam satu tahunnya diberikan 4 termin atau setiap 3 bulan sekali(Direktorat Jaminan Sosial, 2017).

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada informan, semenjak ada bantuan PKH di Desa Karangjati, masyarakat merasa sangat terbantu dan mensejahterakan keluarga penerima, ada perubahan yang dialami penerima manfaat ketika menjadi peserta penerima manfaat PKH, seperti uang tunai yang diberikan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang selama ini belum tercukupi dari hasil pendapatan keluarga, uang bantuan PKH digunakan untuk keperluan dan perlengkapan sekolah anak, keperluan balita serta akses fasilitas kesehatan terdekat.

2. Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam Mensejahterakan Masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Islam, PKH dapat dipandang sebagai langkah konkret dalam memberikan jaminan sosial kepada keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu kepada keluarga miskin yang membutuhkan, dengan tujuan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dianut dalam sistem ekonomi Islam.

Selain itu, pelaksanaan PKH juga mendukung tujuan akhir sistem ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan (falah). Sehingga pelaksanaan Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi islam, yaitu :

a. Adanya Jaminan Sosial

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan oleh pemerintah merupakan bentuk jaminan sosial kepada masyarakat, termasuk anggota PKH di Desa Karangjati. Melalui program ini, masyarakat telah merasakan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan baik.

Dalam bidang pendidikan, anak-anak yang menjadi anggota PKH telah dapat mengakses pendidikan dengan baik. Mereka tidak lagi mengalami kesulitan buta huruf atau terputusnya pendidikan. PKH

memberikan jaminan bahwa anak-anak dapat bersekolah hingga tingkat SMA sederajat dan menerima beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Dalam hal kesehatan, anggota PKH telah mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik. Program PKH bekerja sama dengan dinas kesehatan, sehingga setiap bulan masyarakat dapat mengontrol kesehatannya melalui posyandu ibu hamil, posyandu balita, dan posyandu lansia. Selain itu, setiap anggota juga telah diberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai kartu kesehatan.

Secara keseluruhan, melalui bantuan PKH, anggota masyarakat Desa Karangjati telah mengalami perbaikan dalam pendidikan dan kesehatan. Program ini memberikan jaminan pendidikan hingga tingkat SMA dan akses pelayanan kesehatan yang baik, melalui kerja sama dengan dinas kesehatan.

b. Adanya Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui peran pendamping yang bertugas untuk mengorganisir dan membimbing anggota program. Para pendamping telah menjalankan tugas mereka sesuai dengan instruksi yang diberikan, yaitu memberikan pembinaan dan arahan kepada setiap anggota.

Dengan demikian, tanggung jawab pendamping PKH di Desa Karangjati telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola distribusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan tanggung jawab ini, pendamping berusaha memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan secara lancar kepada penerima manfaat.

Secara keseluruhan, tanggung jawab pendamping PKH di Desa Karangjati telah dilaksanakan dengan tujuan mengelola dan mengawasi distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan tepat.

c. Mewujudkan Kesejahteraan

Untuk mencapai kesejahteraan (falah) dalam kehidupan ekonomi, prinsip keadilan harus diterapkan. Islam mengajarkan pentingnya tegaknya keadilan dalam kehidupan ekonomi, yang akan berdampak pada terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan tidak membedakan dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip keadilan mencakup aspek religi, sosial, ekonomi, dan politik (Afifa Rangkuti, 2017).

Jika prinsip keadilan ini belum tercapai, maka akan berdampak pada tatanan sosial yang sulit mencapai kesejahteraan (falah). Oleh

karena itu, keadilan dalam aspek ekonomi sangat penting untuk menciptakan kesetaraan dan distribusi yang adil dalam masyarakat. Keadilan ekonomi berarti memberikan kesempatan yang sama, akses yang adil, dan perlakuan yang setara bagi semua individu dalam hal ekonomi.

Berdasarkan analisis di atas, Program Keluarga Harapan dalam konteks sistem ekonomi Islam mencakup jaminan sosial dan mencapai kesejahteraan (falah). Program ini telah memberikan jaminan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan, meskipun program ini sendiri bukan konsep dari sistem ekonomi Islam.

Namun, dalam mencapai kesejahteraan (falah), Program Keluarga Harapan masih belum mampu sepenuhnya mensejahterakan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan masih ada sejumlah masyarakat miskin Desa Karangjati yang belum terdaftar atau belum menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat miskin dapat terdaftar dan mendapatkan manfaat dari program ini guna mencapai kesejahteraan yang lebih luas.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Keluarga Harapan memiliki pengaruh dalam mensejahterakan masyarakat Desa Karangjati, terbukti dengan adanya bantuan PKH seluruh peserta penerima manfaat merasakan perubahan yang dialami setelah menerima uang tunai, uang bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan anak sekolah serta mengakses fasilitas kesehatan guna memenuhi kecukupan gizi balita.
2. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan jaminan sosial berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Langkah ini didasarkan pada peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukarno. 2009. Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan Permasalahannya Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan. *Administrasi Publik* [Preprint].
- Andika, S. 2021. “Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)”.
- Direktorat Jaminan Sosial, D.J.P. dan jaminan S.K.S.R. 2012. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*.
- Direktorat Jaminan Sosial, D.J.P. dan jaminan S.K.S.R. 2017. *Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan*.
- Jurnal Dialog Kebijakan Publik. 2012. “Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya”.
- Kemensos RI. 2021. *Buku pedoman pelaksanaa pkh kemenos - Penelusuran Google*. Available at: https://www.google.com/search?q=buku+pedoman+pelaksanaa+pkh+kemenos&rlz=1C1CHBD_enID896ID896&oq=buku+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j0i131i433i512j0i131i433i650j0i131i433i512j0i131i433i650j69i60.1760j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Accessed: 20 July 2023).
- Listiana, W. 2022. “Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”.
- Soemitro, S. dkk. 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi: dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik, edisi Revisi VI. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- TNP2K. 2014. “Program Keluarga Harapan: Upaya Memutus Rantai Kemiskinan Antar Generasi”.
- TNP2K. 2018. *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, Dan Kelompok Tidak Mampu: Menuju Bantuan Sosial Terintegritas*. Jakarta: Pusat 10110.
- Ulya Qorina. 2007. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus Di Desa Kauman Kudus)”.
- Wisnu Indrajid VO Soimin. 2014. “Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)”.